



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KOMANG ARDIANA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 426749

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/120 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 6000 m2/6000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 1250 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** 25.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** 6.000.000

D. SURAT BERHARGA **Rp.** ----

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** 21.462.014

F. HARTA LAINNYA **Rp.** ----

Sub Total **Rp.** 1.302.462.014

III. HUTANG **Rp.** 602.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** 700.062.014

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.